

mengeksplorasi konsep ilmu sosial menjadi satu kesatuan. Dalam pendekatan pembelajaran integratif diyakini membuat peserta didik mendapatkan pengalaman langsung sehingga dapat menambah kekuatan untuk menerima, menyimpan, dan menerapkan konsep yang dipelajari. Tentunya hal ini menjadi pembelajaran yang memberikan ruang agar peserta didik terlatih menemukan sendiri berbagai konsep yang dipelajari menyeluruh (holistik), bermakna, autentik, dan aktif (Trianto, 2010; Abbas E. W., 2018).

Praktik pendekatan integratif dalam pendidikan dimaksudkan untuk mengurai orientasi pendidikan yang parsialistik. Hal ini tentunya merugikan peserta didik. Keberpihakan terhadap satu pendidikan yang ideal ditujukan untuk menerima pembelajaran yang bermakna (Majid, 2014). Orientasi pendidikan parsialistik memiliki kecenderungan mengetahui banyak hal, tetapi kurang memiliki sistem nilai, sikap minat maupun apresiasi positif terhadap yang diketahui. Faktual, berimplikasi peserta didik memiliki kepribadian yang tidak seimbang; aspek pandangan hidup berkembang, tetapi aspek sikap hidup dan keterampilan hidup kurang berkembang.

Ketidakseimbangan perkembangan intelektual dan kepribadian yang dialami peserta didik ini membuat mereka menjadi spesialis dalam bidang tertentu. Ini menimbulkan distorsi nilai dan menimbulkan keyakinan yang kurang peduli terhadap keberadaan lingkungan sekitar. Dengan demikian, peserta didik lebih mudah terjerumus ke dalam tindakan yang melanggar norma yang ada dalam agama dan masyarakat. Sistem nilai yang seharusnya mengatur perilaku sehari-hari masih lemah, yang menyebabkan situasi ini terjadi (Banks, 1985; Abduh, 2015).

Pendekatan integratif untuk pembelajaran IPS menekankan keberhasilan pembelajaran IPS yang efisien dari sudut pandang praktis (Abbas E.W., 2018). Ada perbedaan dalam arti IPS di tingkat sekolah, tergantung pada karakteristik dan kebutuhan peserta didik. IPS untuk Sekolah Dasar (SD), IPS untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan IPS untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki arti yang berbeda-beda, termasuk menggabungkan berbagai mata pelajaran atau program pengajaran (Supardan, 2014). Pengertian IPS di persekolahan tersebut ada yang berarti mata pelajaran yang berdiri sendiri, gabungan dari berbagai mata pelajaran dan ada pula yang mengartikan IPS sebagai program pengajaran (Wahidmurni, 2017).

Pada terminologi yang lebih universal, IPS disebut dengan istilah *social studies* (studi sosial). Sebagaimana di Indonesia, di negara lain, *social studies* adalah mata pelajaran yang mengintegrasikan beberapa muatan keilmuan. Artikel ini disusun untuk memberikan deskripsi dan telaah terkait *social studies* di Indonesia dan New Zealand (Selandia Baru). Praktis bahasan dipersempit pada deskripsi bagaimana penerapan pendekatan integratif. Perihal ini dimaksudkan untuk memberikan uraian yang terfokus pada pendekatan integratif faktual, menjadi satu pendekatan yang berpengaruh dalam pembelajaran IPS di dua negara.

2. Metode Penelitian

Metode kajian literatur adalah dasar dari artikel ini. Kajian literatur adalah studi tentang sumber daya pustaka yang mendukung topik penelitian (raenkel & Wallen, 2012; Zed, 2008). Oleh karena itu, penulis tidak hanya menggunakan buku untuk mengumpulkan literatur, tetapi juga menggunakan mesin pencarian seperti Google Scholar, Researchgate, dan Academia. Sumber literatur berdasarkan kata kunci dikurangi untuk memberikan fokus pada penulisan, seperti pembelajaran integratif, pembelajaran IPS, dan kurikulum di Indonesia dan Selandia Baru.

3. Hasil dan Pembahasan

Kurikulum adalah rencana yang dibuat untuk memulai proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan dan gurunya (Sarinah, 2015). Kurikulum sekolah universal, atau kurikulum nasional, berdampak nyata pada sistem pendidikan dan sistem sosial suatu negara. Hal ini juga berlaku untuk kurikulum sekolah di negara kita. Kurikulum dapat membantu membentuk kepribadian bangsa (Wiryokusumo & Mulyadi, 1988; Hasan, 2008).

Kurikulum dan pembelajaran IPS sebagai ontologi ilmu pendidikan (disiplin) IPS di Indonesia bergantung pada pemikiran individu dan atau kelompok pakar yang ditugaskan secara kebetulan untuk mengembangkan kurikulum (Puskur) (Siska, 2018). Pendidikan IPS adalah program pendidikan atau bidang studi dalam kurikulum sekolah yang mempelajari kehidupan manusia dalam masyarakat dan interaksi manusia dengan lingkungannya (fisik dan sosial). Materi IPS dipilih dari bagian-bagian pengetahuan dan konsep ilmu sosial (Hasan, Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 1996). Sebagai disiplin ilmu, IPS memiliki lima ciri yang meliputi; (1) *social studies as citizenship*

transmission, (2) social studies as personal development, (3) social studies as reflective inquiry, (4) social studies as science education, (5) social studies as rational decision making and social action (Woolever & Scott, 1987).

Demikian dapat dirumsukan bahwa tujuan utama dari IPS pada tingkat sekolah adalah (1) menekankan tumbuhnya nilai kewarganegaraan, moral, ideologi, negara dan agama (2) menekankan pada isi dan metode berfikir ilmuwan, dan (3) menekankan pada *reflective inquiry* (Sumantri, 2001; Syaharuddin & Mutiani, 2020). IPS memiliki tanggung jawab utama yakni membantu peserta didik dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang diperlukan untuk yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat di tingkat lokal, nasional, maupun global (Maryani, 2011).

Pembelajaran IPS selalu berubah karena mempelajari kondisi masyarakat yang berubah secara cepat. Kurikulum IPS dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan mempelajarinya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan IPS di Indonesia, seperti: 1) pengalaman hidup masa lampau dengan situasi sosialnya yg labil memerlukan masa depan yg lebih mantap dan utuh sebagai suatu bangsa yg bulat; 2) perkembangan pendidikan, teknologi, dan budaya Indonesia memerlukan kebijakan pendidikan pengajaran yang seirama dengan laju perkembangan tersebut; serta 3) luaran pendidikan persekolahan benar dan relevan dengan tuntutan masyarakat yg ia akan menjadi bagiannya dan materi yg dimuat dalam kurikulum atau dipelajari peserta didik dapat bermanfaat (Abbas E. W., 2018; Sapriya, 2012).

Kurikulum IPS, yang harus dipelajari oleh semua peserta didik, dimaksudkan untuk mempersiapkan peserta didik untuk terjun ke dalam kehidupan masyarakat di masa depan. Program pengajaran ilmu-ilmu sosial telah menggunakan metode tradisional sejak kurikulum dimulai pada tahun 1964–1968. Sejarah, geografi, dan ekonomi, misalnya, masih dipelajari secara terpisah. Sebagian besar mengakui bahwa sistem tersebut sebenarnya sudah tua dan tidak relevan lagi.

Pada tahun 1972, badan penelitian pendidikan (sekarang BP3k) di Jakarta berkumpul dengan para ahli pendidikan dari Institut Keguruan dan Ilmu Kependidikan (IKIP) dan lembaga lain untuk membahas rencana pembaharuan kurikulum sekolah di Indonesia. Pada pertemuan tersebut, disepakati bahwa mata pelajaran kemasyarakatan (ilmu sosial), seperti

sejarah, geografi, ekonomi, dan lain-lain, harus digabungkan menjadi satu bidang studi melalui kurikulum *broadfield* baru.

Perpaduan ilmu-ilmu sosial menjadi satu bidang IPS diterapkan pada kurikulum 1974 untuk 8 buah proyek perintis sekolah pembangunan (PPSP). Setahun kemudian nama bidang studi IPS resmi memperoleh status formal melalui pembakuan kurikulum 1975 untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Demikian, sejak 1975 hingga saat ini IPS dipersekolahkan dimaknai sebagai gabungan (*integrated*) dari sejumlah mata pelajaran atau disiplin ilmu, dan ada yang berarti program pengajaran (Sapriya, 2012). Materi untuk pengajaran PIPS sebagai mata pelajaran disiapkan secara sistematis, komprehensif, dan terpadu. Namun, harus dipahami bahwa ruang lingkup IPS dipersekolahkan kemudian menjadi berbeda penyajian berdasarkan jenjangnya (Hasan, 1996; Abbas E. W., 2015).

Implementasi kurikulum IPS pada pendidikan dasar (SD/MI) dan menengah (SMP/MTs) menitikberatkan pembentukan karakter peserta didik yang baik dan mampu berfikir secara cerdas. Cerdas dalam artian ini adalah peserta didik mampu menyeleksi, mengadaptasi, mengabsorpsi, dan mengaplikasikan nilai-nilai yang ada dalam agama, kebudayaan, negara (dalam maupun luar) (Abbas E. W., 2013). Di sisi lain melalui implementasi PIPS yang demikian, peserta didik disiapkan untuk menghadapi permasalahan sosial sederhana hingga kompleks (baik di lingkungan sekitar ataupun global). Oleh karena itu, PIPS pada jenjang dasar dan menengah diupayakan untuk terus menyajikan materi IPS yang kontekstual dan tematik.

Pada jenjang menengah atas (SMA/SMK/MA) PIPS diinterpretasikan dalam dua arti. Pertama, IPS merupakan salah satu jenis dari program studi konsentrasi yang diakomodir oleh sekolah berdasarkan kebijakan pemerintah. Kedua, bisa berarti sejumlah mata pelajaran yang termasuk ke dalam disiplin ilmu-ilmu sosial. Mata pelajaran yang termasuk dalam IPS di tingkat meliputi: Sosiologi, Antropologi, Ekonomi, Geografi, dan Sejarah. Hal inilah, kemudian yang menjadikan ciri penyajian materi IPS di jenjang menengah atas terpisah (*separated*) (Sapriya, 2012).

Di Selandia Baru (New Zealand) termasuk satu diantara negara *OECD* (*Organisation for Economic Cooperation and Development*). Berdasarkan ranking yang dikeluarkan OECD, pendidikan Selandia Baru berada pada urutan ke-7 terbaik didunia, dan

secara signifikan berada di atas rata-rata negara-negara OECD. Berdasarkan publikasi *Human Development Index* PBB pada tahun 2008, *Education Index* Selandia Baru adalah 0,993, merupakan diantaranya yang tertinggi di dunia disamping Denmark, Finlandia, dan Australia. Kebijakan dan strategi pendidikan difokuskan untuk membangun sistem pendidikan terkemuka dunia dengan membekali peserta didik berbagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai agar jadi warga negara yang sukses. Oleh karena itu, guna mencapai hal tersebut diperlukan sinergitas antar *stakeholder*, seperti: kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua (Syuhendri, 2012).

Kurikulum di Selandia Baru sifatnya adalah kurikulum umum yang memfokuskan pada pembelajaran secara individual dan dalam kelompok kecil. Karena sifatnya hanya mencakup hal yang umum saja, maka sekolah diberi kesempatan untuk melakukan modifikasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Ujian nasional di Selandia Baru tidak diberikan bagi peserta didik yang belajar pada *elementary school*. Namun, ketika peserta didik belajar di *secondary school* penilaian ujian nasional dilakukan secara formatif. Selain itu, *outdoor education* juga menjadi satu titik fokus pada kurikulum yang berlaku di Selandia Baru. Kebanyakan sekolah di Selandia Baru adalah sekolah negeri, sehingga dukungan dari pemerintah dan masyarakat merupakan faktor pendukung utama penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Dalam terbitan *New Zealand Education Review* (30 Agustus 1996), Lockstone membuat beberapa komentar yang familiar tentang IPS. Dia berpendapat bahwa IPS bukanlah mata pelajaran yang nyata, tujuannya muluk-muluk dan tidak jelas, isinya dangkal, siapa pun dapat mengajarkannya karena Anda sebenarnya tidak perlu tahu apa-apa, dan tentu saja guru IPS umumnya adalah subversif berbahaya yang tujuan sebenarnya adalah memanipulasi pikiran anak muda Selandia Baru. Rodney Hide menggunakan argumen yang sama dalam Richard Prebble's "*I'll been Thinking*" dengan menyampaikan "IPS hanyalah daftar topik yang benar secara politis tanpa dasar pengetahuan atau pemahaman tentang bagaimana dunia nyata bekerja". Pernyataan dari Lockstone dan Hide hanya berpikir bahwa IPS adalah studi yang sempit dan tidak berdasar. Pandangan ini sangat mendeskreditkan posisi IPS sebagai studi sosial yang mengeksplorasi kajian manusia dengan multidisiplin (Barr, Barth, & Shermis, 1977).

Di Selandia Baru, IPS dimulai lebih dari 50 tahun yang lalu sebagai program studi yang

berbeda dan independen. Meskipun mengacu pada materi konten dari beberapa disiplin ilmu lain, IPS memiliki struktur yang dapat diidentifikasi sendiri. Lockstone (1996) berpendapat bahwa, "tidak ada definisi yang disepakati sebagai studi sosial (IPS)" tetapi ini jelas tidak benar. Meskipun kurikulum IPS jelas berbeda dari satu negara ke negara lain, sebagian besar sangat mirip dalam hal tujuan, pedagogi, dan struktur (Barr, Barth, & Shermis, 1977). Sebagai contoh, semua didasarkan pada untaian, semua mengungkapkan tujuan mereka dalam istilah yang serupa, dan semua mendukung metode pengajaran dan pembelajaran yang serupa. Ada kesepakatan internasional tentang IPS dan tujuannya.

Tujuan pertama dari studi sosial adalah "memahami dunia". Kurikulum IPS menggunakan istilah "pemahaman" secara sadar karena pembelajaran dalam IPS melibatkan lebih dari sekedar menghafal informasi faktual. Pengetahuan faktual digunakan sebagai dasar untuk membantu peserta didik mengembangkan konsep dan pemahaman umum. Keterampilan berpikir penting dalam pelajaran IPS karena peserta didik menggunakannya untuk memproses fakta agar item informasi tertentu dapat berhubungan satu sama lain.

Tidak semua pendidik IPS di Selandia Baru menyetujui terminologi eksak tetapi semua akan setuju bahwa pemahaman dalam IPS diekspresikan sebagai ide, konsep atau generalisasi. Dalam terminologi ilmu sosial, suatu konsep dapat dianggap sebagai abstraksi yang menyatukan sejumlah fakta. Konsep dapat digunakan untuk mengelompokkan fakta, mengaturnya, dan mencoba memahaminya dengan mengungkapkan pola persamaan dan perbedaan. Melihat tingkat konseptualisasi berikutnya, "pemahaman" sebagai tahap perantara antara konsep dan generalisasi. Di Selandia Baru, banyak guru menyebut pemahaman seperti itu sebagai gagasan utama atau gagasan penting (Beyer, 1979).

Pemahaman yang dikembangkan untuk satu situasi dapat diterapkan kembali dalam situasi lain untuk mengembangkan generalisasi. Peserta didik yang bekerja pada Organisasi Sosial dan Proses untaian dalam Studi Sosial di Kurikulum Selandia Baru mungkin mengembangkan pemahaman yang berhubungan dengan cara-cara di mana komunitas Kepulauan Pasifik mengatur dirinya sendiri untuk menghadapi siklon (NZDE, 1961). Pemahaman yang sama ini dapat diterapkan kembali untuk menunjukkan bagaimana komunitas Selandia Baru menangani gempa bumi, atau komunitas Asia dengan banjir.

Belajar tentang siklon, banjir, dan gempa bumi merupakan hal yang kebetulan dari tujuan utama belajar tentang cara orang-orang yang bersangkutan membentuk kembali organisasi sosial mereka untuk menghadapi keadaan darurat, dan mengembangkan generalisasi yang menjelaskan hal ini (Hunter & Keown, 2001).

Generalisasi dapat dikatakan sebagai tahap akhir dari pembelajaran IPS. Generalisasi dapat membantu kita menjelaskan atau memprediksi; mereka meringkas apa yang dianggap benar tentang kasus serupa dan memberikan cara untuk mensintesis informasi. Generalisasi, tentu saja, bukanlah kebenaran mutlak. Mereka harus dianggap sebagai pernyataan tentang yang dapat dimodifikasi, diperluas atau dikualifikasi. Generalisasi berbeda dengan pemahaman di mana pemahaman merujuk pada tempat, waktu, orang, atau item tertentu. Generalisasi lebih luas dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi.

Demikian, dalam IPS yang baik, anak-anak tidak hanya peduli dengan fakta belajar; informasi faktual dikumpulkan dan diolah menjadi konsep, pemahaman (atau gagasan penting), dan generalisasi. Tingkat pemahaman terlihat dalam Studi Sosial di Kurikulum Selandia Baru. Peserta didik memulai suatu unit dengan menemukan fakta, fakta-fakta ini diproses dan disempurnakan menjadi konsep yang lebih abstrak dan ide penting, dan ini mengarah pada generalisasi yang merupakan tujuan pencapaian. Perihal inilah yang membedakan Kurikulum Berbasis Kompetensi dalam IPS di Selandia Baru dimana menekankan pada penguasaan disiplin ilmu sosial (Sejarah, geografi, ilmu politik-civics, ekonomi) juga mengembangkan delapan keterampilan penting (*essential skills*) yang juga diajarkan pada semua mata pelajaran dan pada semua jenjang pendidikan di Selandia Baru, meliputi: 1) Komunikasi; 2) Kemampuan dalam matematika; 3) Informasi; 4) Pemecahan masalah; 5) Manajemen diri dan kompetitif; 6) Sosial dan koperasi; 7) Fisik; dan 8) Pekerjaan dan studi (Kissock, 1981)

Kedelapan kemampuan esensial (*essential skills*) tersebut diramu dalam pembelajaran IPS melalui inkuiri, penggalian nilai (*values exploration*), dan pengambilan keputusan sosial (*social decision making*). Penerapan pendekatan integratif dalam Pendidikan IPS di Selandia Baru nyatanya mampu menjembatani misi kenegaraan. IPS adalah bidang kurikulum yang sebagian besar bertanggung jawab untuk mendidik warga muda dalam pengetahuan, keterampilan, keyakinan, dan nilai-nilai yang terkait dengan pengambilan keputusan

partisipatif (Kissock, 1981; Hunter & Keown, 2001).

Pendidikan semacam ini menuntut peserta didik untuk melatih keterampilan seperti mengevaluasi keakuratan informasi, membedakan fakta dan opini, membuat perbandingan, menghormati hak orang lain untuk mengungkapkan pandangan, dan membuat keputusan berdasarkan bukti yang dipertimbangkan. Keterampilan seperti itu dapat diajarkan, dan dapat dinilai (Keown, Parker, & Tiakiwai, 2005). Kebutuhan pendidikan warga negara demokratis tentu saja mencakup fakta tetapi demokrasi membutuhkan lebih banyak; warga negara yang baik harus mampu berpikir dan memiliki komitmen terhadap demokrasi dan cita-cita demokrasi. Warga negara yang baik harus menjadi pembuat keputusan yang bertanggung jawab.

Perhatian utama yang diungkapkan oleh kritikus IPS adalah bahwa subjek melibatkan, "mengutak-atik kepribadian peserta didik" (Lockstone 1996). Jika kritik ini berarti bahwa IPS adalah tentang mengajar anak-anak untuk berpikir maka mereka benar. Ilmu sosial adalah agen sosialisasi sejauh itu berkaitan dengan transmisi informasi faktual dan memperkuat perilaku yang dapat diterima. Sosialisasi berkaitan dengan mentransmisikan sikap yang beralasan, pemahaman tentang budaya demokrasi dan dengan mengembangkan kebiasaan dasar yang diperlukan untuk membuat demokrasi berjalan. Tetapi studi sosial memiliki hal lain fungsi, yaitu 'kontra-sosialisasi' Kontra sosialisasi adalah proses mengembangkan pemikiran kritis yang mandiri, dan dengan memupuk tanggung jawab individu. Fokus kontra sosialisasi adalah mempertanyakan keabsahan klaim alternatif.

Sosialisasi adalah proses pelestarian yang berupaya melestarikan praktik yang berlaku dan kohesivitas sosial, sedangkan kontra sosialisasi adalah proses mengembangkan kemampuan individu untuk menjadi warga negara yang rasional, bijaksana, dan mandiri. Dalam demokrasi, sosialisasi perlu diimbangi dengan kontra sosialisasi. Kekuatan praktik pendekatan integratif dalam pembelajaran IPS dimaksudkan untuk mencapai keterampilan berpikir peserta didik yang rumit. Secara konseptual ini dimaknai penurunan dari kurikulum nasional (Selandia Baru) sebagai rencana studi sosial di sekolah (NZDE, 1961).

Tujuan keterampilan berpikir dalam pendekatan integratif melibatkan beberapa keterampilan yang digunakan peserta didik dalam memproses informasi faktual untuk

mencapai tujuan pengetahuan. Pencapaian kurikulum nasional tingkat tiga dan empat di untaian Tempat dan Lingkungan (Orang berhubungan dengan lingkungan dengan cara yang berbeda; interaksi orang dengan lingkungan telah berubah seiring waktu). Jika guru memilih Indian Dataran Amerika sebagai latar, dia dapat mengembangkan pemahaman bahwa orang Indian Dataran mengandalkan lingkungan fisik untuk makanan, mereka memperlakukan lingkungan dengan hormat, dan gaya hidup mereka harus berubah (Beyer, 1979; Hunter & Keown, 2001).

IPS dengan menerapkan pendekatan integratif menyatukan pengembangan konsep, pemahaman dan generalisasi tentang perilaku manusia dan tentang menghasilkan pemikiran, warga negara yang bertanggung jawab. Ilmu sosial membantu anak-anak untuk memahami dunia sehingga mereka dapat memahami diri mereka sendiri dan berpartisipasi secara efektif dalam dunia mereka. Kurikulum IPS yang baik akan membuat guru sadar akan sentralitas pemahaman konseptual, memberi mereka model keterampilan berpikir yang praktis dan tepat yang akan membantu peserta didik "mengembangkan pemahaman tentang orang dan interaksi mereka satu sama lain dan lingkungan mereka", dan memungkinkan peserta didik untuk "berpartisipasi dalam masyarakat yang berubah sebagai warga negara yang percaya diri, berpengetahuan dan bertanggung jawab.

4. Simpulan dan Saran

Perpaduan ilmu-ilmu sosial menjadi satu bidang IPS diterapkan pada kurikulum 1974 untuk 8 buah proyek perintis sekolah pembangunan (PPSP). Setahun kemudian nama bidang studi IPS resmi memperoleh status formal melalui pembakuan kurikulum 1975 untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Demikian, sejak 1975 hingga saat ini IPS dipersekolahkan dimaknai sebagai gabungan (*integrated*) dari sejumlah mata pelajaran atau disiplin ilmu, dan ada yang berarti program pengajaran. Materi untuk pengajaran IPS sebagai mata pelajaran disiapkan secara sistematis, komprehensif, dan terpadu.

Namun, harus dipahami bahwa ruang lingkup IPS dipersekolahkan kemudian menjadi berbeda penyajian berdasarkan jenjangnya. Implementasi kurikulum IPS pada pendidikan dasar (SD/MI) dan menengah (SMP/MTs) membentuk (karakter) peserta didik yang baik dan mampu berfikir secara cerdas. Cerdas dalam artian ini adalah peserta didik mampu menyeleksi, mengadaptasi, mengabsorpsi, dan

mengaplikasikan nilai yang ada dalam agama, kebudayaan, negara (dalam maupun luar).

Di Selandia Baru, perhatian utama yang diungkapkan oleh kritikus IPS adalah bahwa subjek melibatkan, "mengutak-atik kepribadian peserta didik". Jika kritik ini berarti bahwa IPS adalah tentang mengajar anak-anak untuk berpikir maka mereka benar. Ilmu sosial adalah agen sosialisasi sejauh itu berkaitan dengan transmisi informasi faktual dan memperkuat perilaku yang dapat diterima. Sosialisasi berkaitan dengan mentransmisikan sikap yang beralasan, pemahaman tentang budaya demokrasi dan mengembangkan kebiasaan dasar yang diperlukan untuk membuat demokrasi berjalan. Tetapi studi sosial memiliki hal lain fungsi, yaitu 'kontra-sosialisasi'. Pemanaan kontra-sosialisasi sebagai tahapan proses mengembangkan pemikiran kritis yang mandiri, dan dengan memupuk tanggung jawab individu. Fokus kontra sosialisasi adalah mempertanyakan keabsahan klaim alternatif.

Dalam mengintegrasikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dalam kurikulum pendidikan di Selandia Baru dan Indonesia, penting untuk mengembangkan kurikulum yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan peserta didik, sambil meningkatkan pelatihan guru dalam mengintegrasikan metode pembelajaran aktif dan pengembangan keterampilan berpikir kritis. Dalam pembelajaran, peserta didik harus diberdayakan, disertai nilai-nilai demokrasi, pluralisme, pemikiran kritis sambil menekankan evaluasi formatif berkelanjutan yang bertujuan memantau perkembangan mereka dengan cara yang lebih positif. Sebagai hasilnya, IPS belajar bisa menjadi lebih menarik, efektif dan membentuk peserta didik yang memiliki pemahaman mendalam tentang masyarakat dan budaya mereka sambil tetap mampu berpikir secara kritis pada tantangan dunia modern.

Daftar Pustaka

- Abbas, E. W. (2013). *Mewacanakan Pendidikan IPS*. Bandung: Wahana Jaya Abadi.
- Abbas, E. W. (2015). *Pendidikan IPS Berbasis Kearifan Lokal. Penyunting*. Bandung: Wahana Jaya Abadi, dan FKIP-Unlam Press.
- Abbas, E. W. (2018). *Penguatan Pendidikan IPS Di Tengah Isu-Isu Global*.
- Abduh, M. (2015). Pengembangan Perangkat Pembelajaran Tematik-Integratif Berbasis sosiokultural di Sekolah Dasar. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*.
- Banks, J. (1985). *Teaching Strategies for Social Studies: Inquiry, Valuing, and Decisions*

- Making, Third Edition*. New York: Longman, Inc.
- Barr, R. D., Barth, J. L., & Shermis, S. S. (1977). *Defining the social studies* (No. 51). Arlington, VA: National Council for the Social Studies.
- Beyer, B. (1979). *Teaching Thinking in the Social Studies*. Ohio: Columbus .
- Hasan, S. H. (1996). *Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*. Bandung: Rineka Cipta.
- Hasan, S. H. (2008). *Evaluasi Kurikulum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Hunter, P., & Keown, P. (2001). The New Zealand social studies curriculum struggle 1993-1997: An "insider" analysis. . *Waikato Journal of Education*, 7.
- Keown, P., Parker, L., & Tiakiwai, S. (2005). Values in the New Zealand curriculum; Unpublished literature review prepared for the New Zealand Ministry of Education. <http://www.minedu.govt.nz/~media/MinEdu/Files/EducationSector/PrimarySecondary/Curri>.
- Kissock, C. (1981). *Curriculum planning for social studies teaching: A cross-cultural approach*. Chichester: J. Wiley.
- Majid, A. (2014). *Pembelajaran Tematik Terpadu*. . Bandung:: PT Remaja Rosdakarya .
- NZDE. (1961). *Social Studies in the Primary School*. New Zealand: New Zealand Department of Education.
- raenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2012). *How to Design and Evaluate. Research in Education 8th Edition*. Boston: McGraw-Hill Higher Education.
- Sapriya. (2012). *Pendidikan IPS: Konsep dan Pembelajaran*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sarinah. (2015). *Pengantar Kurikulum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Siska, Y. (2018). *Pembelajaran IPS di SD/MI*. Yogyakarta: Garudhwaca.
- Sumantri, N. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung : Rosda Karya.
- Supardan, D. (2014). *Pendidikan IPS: Perspektif Filosofi, Kurikulum, dan Pembelajaran*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Syahrudin, & Mutiani. (2020). *Strategi Pembelajaran IPS; Konsep dan Aplikasi*. Banjarmasin : Program Studi Pendidikan IPS FKIP ULM.
- Syuhendri. (2012). Pengelolaan Sekolah untuk Mengembangkan Sumber Daya Manusia dan Implementasinya pada Pembelajaran IPA SD: Suatu Refleksi Hasil Short Course di New Zealand". *Seminar Nasional Diseminasi Hasil Pelatihan Luar Negeri*.
- Trianto. (2010). *Model Pembelajaran Terpadu; Konsep, Strategi, dan Implementasi dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wahidmurni. (2017). *Metodologi Pembelajaran IPS: Pengembangan Standar Proses Pembelajaran IPS di Sekolah/Madrasah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Wiriyokusumo, I., & Mulyadi, U. (1988). *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Woolever, R. M., & Scott, K. P. (1987). *Active Learning in Social Studies. Promoting Cognitive and Social Growth*. Boston: Scott Foresman.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor